

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NU (Nahdlatul Ulama), dikenal sebagai organisasi yang berhaluan “tradisional” yang dilawankan dengan “modernis”. Disebut demikian, karena NU memang bertujuan untuk mempertahankan atau memelihara tradisi Islam yang disebut paham “*ahlussunnah wa al jamaah*” (aswaja). Tradisi ini sebenarnya adalah sebuah konsensus besar di bidang teologi dan fikih. Di bidang teologi, NU mengikuti aliran kalam Asy`ariah dan Maturidiyah. Di bidang fikih, mengikuti empat mazhab besar, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi`ie, mazhab Hanafie dan mazhab Hanbali. Di Indonesia, ada juga organisasi-organisasi gerakan Islam yang memang mengikuti mazhab yang lebih khusus lagi, yakni Syafi`ie, sedang di bidang tasawuf mengikuti al Ghazali. Di dunia Islam, ada juga yang mengikuti mazhab yang lebih spesifik, misalnya di Pakistan yang umat Islamnya cenderung mengikuti mazhab Hanafie, di Saudi Arabia, khususnya di Madinah, mengikuti mazhab Maliki dan di negara-negara Afrika Utara, banyak mengikuti mazhab Hanbali. Umat Islam Indonesia sendiri dikenal sebagai penganut mazhab Syafi`ie. Namun NU di Indonesia lebih “terbuka”, sehingga dalam pembahasan mengenai fikih atau hukum-hukum agama, NU bisa melakukan analisis perbandingan mazhab.¹

¹ M. Dawam Rahardjo, *Nahdlatul Ulama dan Politik. Dalam Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004), cet. I, h. xxiii.

Dengan haluan mempertahankan tradisi itulah, maka NU distigmatisasi sebagai cenderung kepada sikap “konservatif” yang dilawankan dengan “progresif”. Haluan ini umumnya dianggap curiga atau takut kepada perubahan dan kemajuan. Sikap ini berhadapan dengan sikap progresif yang selalu mendorong perubahan dan terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks yang lebih baru, kelompok konservatif ini dianggap menjadi penghambat modernisasi atau pembangunan. Jika modernisasi dan pembangunan umumnya ingin melakukan perubahan kelembagaan dan nilai-nilai tradisional yang dianggap menghambat maka kelompok konservatif ini cenderung menolak dan menghalangi perubahan tersebut.²

Dalam kenyataan sejarah, khususnya dalam perkembangan politik, NU justru tidak menampakkan konservativismenya, terutama dari sikap dan perilaku politiknya. Di sini timbul pertanyaan, apakah politik itulah yang mendinamisasi NU? Karena dalam politik, NU harus berhadapan dengan berbagai persoalan kenegaraan dan berinteraksi dengan berbagai kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Politik itulah yang mengharuskan NU merespons berbagai masalah yang dijumpai, sehingga timbul pemikiran-pemikiran baru. Karena itu maka NU berkembang sebagai kekuatan politik yang dinamis. Dalam kenyataannya, NU memang menjadi kekuatan politik, atau paling tidak memiliki nilai politik yang dipertimbangkan oleh berbagai kekuatan politik.³

NU yang artinya adalah “Kebangkitan Ulama” lebih banyak mempertahankan diri dalam jaringan “*jama'ah*” atau “organisasi” informal yang dilawankan dengan

²*Ibid*, h. xxiv.

³*Ibid*.

“*jam’iyah*” yang merupakan organisasi formal, dengan struktur dan fungsi yang jelas. Ini tidak berarti bahwa *jama’ah* itu kurang efektif dari *jam’iyah*. Karena jaringan informal itu ternyata cukup efektif yang didasarkan pada solidaritas mekanis yang dilawankan dengan solidaritas organis atau solidaritas fungsional. Jaringan mekanis tersebut bertumpu pada jaringan ulama, jaringan keluarga dan jaringan lembaga, yaitu pesantren.⁴

Pada umumnya, NU dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan atau organisasi kultural. Ketika bergerak di bidang politik, NU dianggap telah mengingkari identitasnya. Karena itu pada tahun 1984, Muktamar Situbondo mendeklarasikan “kembali ke khittah” yang maksudnya kembali kepada jati dirinya. Namun gejala politik muncul lagi dalam diri NU ketika KH. Abdurrahman Wahid dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI ke-4. Ketika itu praktis NU masuk kedua politik dan menjadi gerakan Islam politik yang dilawankan dengan Islam kultural itu. Sungguhpun demikian, KH. Abdurrahman Wahid masih tetap mengaku sebagai “budayawan”, artinya bukan politisi. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar. Walaupun begitu, jika yang dimaksud sebagai Islam kultural itu adalah gerakan Islam yang tidak berorientasi kepada cita-cita Negara Islam, melainkan mencitacitakan terwujudnya masyarakat Islam dan budaya Islam, maka NU dan KH. Abdurrahman Wahid memang termasuk ke dalam kategori Islam kultural, walaupun melakukan aktivitas politik. Sementara itu, dunia politik adalah dunia “ijtihad” atau masalah “keduniawian” yang berada di luar wilayah keagamaan. Ingat “ijtihad” diperbolehkan jika orang tidak menemui petunjuk yang konkret dari Alquran

⁴*Ibid*, h. xxviii - xxix.

maupun Sunnah. Di sini berlaku prinsip “engkau lebih tahu terhadap masalah duniamu” (*antum a’lamu bi umuri duniyakum*). Itulah yang disebut sebagai wilayah “sekuler” di mana orang bebas berpikir.⁵

Namun jika dicermati, NU sebenarnya lahir sebagai gejala politik. Latar belakangnya adalah kekhawatiran bahwa otoritas politik Islam pada waktu itu, yaitu Raja Ibn Sa`ud akan memberlakukan paham Wahabisme yang diperkirakan akan mengikis tradisi. Tapi dalam pembentukan delegasi menghadap Raja Ibn Sa`ud, yang terpilih adalah tokoh-tokoh modernis. Itulah yang menimbulkan kerisauan, sehingga timbul gagasan untuk membentuk Komite Hijaz yang kemudian menjelma menjadi organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dengan demikian, maka untuk membela tradisi, para ulama membentuk organisasi politik. Di situ, langkah-langkah politik diambil dengan tujuan untuk melindungi agama. Karena itu, walaupun wilayah politik itu berada di luar wilayah agama, namun politik tetap berkaitan dengan agama. Agaknya inilah menimbulkan problematik komunikasi pada gerakan politik NU.⁶

Karena itu maka perilaku NU itu memang agak sulit dipahami. Seperti tampak dalam kejadian akhir-akhir ini, yaitu setelah kembali ke khittah, yang berarti kembali menjadi organisasi keagamaan yang bercorak kultural, ternyata justru NU mendirikan sebuah partai politik baru. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Bahkan lebih dari itu, partai yang didirikan NU yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan diri sebagai “partai terbuka” yang dimasuki oleh orang-orang

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, h. xxx.

dari kalangan Kristen dan Katholik. Sebenarnya konsep partai terbuka itu menimbulkan masalah keagamaan. PKB, misalnya, telah menampilkan calon anggota legislatif antara lain seorang yang beragama Katholik, bahkan seorang mantan pastor. Padahal dalam pandangan fikih, dilarang memilih pemimpin yang bukan muslim, tapi PKB malahan mencalonkan seorang pemimpin dari kalangan Katholik.⁷

Namun ternyata, hal tersebut tidak menimbulkan protes dari umat NU. Ini berarti bahwa, NU telah mengikuti pandangan yang sekuler, yaitu yang memisahkan masalah agama dengan masalah politik. Larangan memilih pemimpin dari kalangan Kristen, Katholik atau agama lain adalah ketentuan keagamaan. Mungkin yang dimaksud dengan “pemimpin” di situ adalah pemimpin agama, yang lazim disebut imam. Jadi, tidak mungkin memilih salah seorang anggota pengurus NU dari kalangan agama lain. Tapi di lingkungan partai politik semacam PKB, hal itu tidak dilarang.⁸

Malahan lain yang timbul adalah pencalonan perempuan sebagai presiden. Banyak kalangan NU yang mengeluarkan pendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh dijadikan kepala negara. Dengan mengutip ayat Alquran atau hadis nabi, perempuan memang diharamkan untuk diangkat menjadi pemimpin. Namun, Ketua Umum NU, KH. Hasyim Muzadi, menolak “lamaran” Wiranto untuk menjadi calon wakil presiden. Ia sebaliknya bahkan memilih untuk menerima “lamaran” Megawati Soekarnoputri yang perempuan. Sebelumnya, Hamzah Haz, juga seorang NU,

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

bersedia menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarnoputri. Padahal sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuainya, pernah menolak perempuan menjadi pemimpin atas dasar hukum fikih. Karena itu, setelah resmi Hasyim berpasangan dengan Megawati, maka keluarlah fatwa atau pandangan dari seorang kiai khos NU, KH Abdullah Faqih, yang mengharamkan perempuan menjadi presiden. Dalam berbagai keterangan para tokoh NU dan PKB, ternyata soal perempuan menjadi pemimpin, termasuk menjadi presiden itu telah diputuskan dalam Musyawarah Alim Ulama di Pasuruan beberapa waktu yang lalu, yaitu diperbolehkan. Karena itulah maka KH Hasyim Muzadi menerima permintaan Megawati menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengannya.⁹

Pandangan tentang hubungan NU dan politik sesungguhnya bagai pinang dibelah dua, keduanya tidak dapat dipisahkan. Mayoritas kiai menyatakan bahwa NU dan politik adalah dua entitas yang tidak bersifat diametral, keduanya berhubungan satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh KH. Miftachul Akhyar¹⁰, bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan politik karena manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Begitu juga NU, sebagai organisasi yang memiliki massa besar, NU tidak bisa menghindar dari kehidupan politik. Hanya saja, politik NU haruslah politik kebangsaan bukan politik praktis yang sibuk memperebutkan

⁹*Ibid*, h. xxxi.

¹⁰Pengasuh Pesantren “Ihyaus Sunnah” Surabaya, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur (kini Rais Syuriah PWNU Jatim). Pernah terlibat dalam perumusan pencalonan Hasyim Muzadi pada pemilu 2004 sebagai Cawapres Megawati Soekarno Putri. Trianto, *Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama: Antara Keteguhan Khittah dan Syahwat Politik. Dalam Tim PW. LTN-NU Jawa Timur, Sarung & Demokrasi: Dari NU Untuk Peradaban Keindonesiaan*, (Surabaya: Khalista, 2008), h. 92.

kekuasaan. NU sebagai *jam`iyyah ijtimaiyyah diniyyah* harus menjadi *rahmatan lil alamin*, sekaligus kontrol bagi kehidupan politik.¹¹

Senada dengan KH. Miftachul Akhyar, KH. Ahmad Subadar¹² mengungkapkan jika warga NU bersikap apolitik maka Indonesia bisa hancur. Kiai Subadar mencontohkan pada pemilu 2004 silam, jika warga NU tidak ikut berpartisipasi maka tatanan demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia tidak akan terwujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Miftah, Kiai Subadar juga menggarisbawahi bahwa yang dimaksud politik dalam konteks hubungannya dengan NU bukan politik kekuasaan melainkan politik partisipatoris yaitu politik dimana NU juga berperan aktif dalam membangun bangsa dan Negara.¹³

Pendapat berbeda dengan substansi yang sama disampaikan Kiai Abdullah Schal¹⁴, walaupun NU membutuhkan pemerintah, tetapi NU tidak ada hubungannya dengan politik. NU adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Jika NU ada hubungannya dengan pemerintah maka itu hanya sebatas kewajiban sebagai rakyat. Kiai Abdullah memahami bahwa peran politik yang

¹¹*Ibid.*

¹²Pengasuh Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan. Dalam perpolitikan Nasional Kiai Subadar sering mendapatkan sorotan media, terkait penyelenggaraan forum bahtsul masail yang menghasilkan fatwa pengharaman terhadap presiden wanita. Forum ini dilaksanakan bertepatan dengan pemilu capres 2004 sehingga banyak penilaian bahwa hasil itu sarat dengan tendensi politik. *Ibid.*, h. 93.

¹³*Ibid.*

¹⁴Pengasuh PP. Syaichona Cholil Bangkalan Madura, Kiai Abdullah merupakan salah satu keturunan Kiai Cholil, ulama karismatik yang memberikan restu dan beberapa bacaan (amalan) kepada Kiai Hasyim ketika NU akan didirikan pada tahun 1926. *Ibid.*

diamainkan oleh NU haruslah sesuai dengan cita-cita para pendiri NU terdahulu, yakni ikut menciptakan masyarakat yang sejahtera.¹⁵

Tidak demikian dengan Kiai Ali Maschan Moesa¹⁶, yang mengartikan bahwa NU menjadikan politik hanya sebagai instrument untuk mencapai tujuan NU. Sebagaimana pendidikan, dakwah, ekonomi dan lainnya, politik juga merupakan sarana mengejawantahkan visi dan misi organisasi. Politik dalam konteks NU bukan upaya mendapatkan kekuasaan atau hanya demi kepentingan yang oportunistik. Mengenai hal ini, Kiai Ali menjelaskan lebih lanjut mengatakan sebagai berikut:

NU tidak main politik praktis, namun kalau NU memperjuangkan agama ini menggunakan instrumen politik, ini tidak salah? Artinya NU harus tidak anti politik. Apakah politik kebangsaan, kerakyatan atau juga politik kekuasaan, asalkan kekuasaan yang ada dapat dijadikan instrumen bukan tujuan.¹⁷

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, NU tetap tidak bisa lepas dari politik, akan tetapi politik dalam perspektif NU adalah politik kebangsaan dan partisipatoris. *Kedua*, dengan massa yang besar NU tidak mudah memisahkannya dengan politik, termasuk politik praktis. *Ketiga*, NU menjadikan politik sebagai instrumen dalam mencapai tujuan-tujuannya¹⁸.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, pengasuh pesantren Mahasiswa Luhur Al-Husna Surabaya, juga sebagai dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Ibid*, h. 95

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid*, h. 96.

Tokoh yang paling lama memimpin NU adalah Kiai Idham Chalid, oleh karena itu tidak sedikit kalangan yang mencitrakan NU sebagai Idham Chalid, hal itu bisa dipahami karena beliau memimpin NU selama 28 tahun.¹⁹

Selama ini NU dicitrakan sebagai konservatif, tradisional, oportunistis, tidak bias memimpin dan sebagainya. Padahal pada diri Kiai Idham Chalid tercermin seorang yang dinamis dan progresif, menghargai kemajuan dan bahkan berkarakter manusia modern, terpelajar dan memiliki pergaulan sangat luas, karena menguasai berbagai bahasa asing—Jepang, Belanda, Inggris dan Arab. Demikian pula dalam politik bukanlah orang yang oportunis sebagaimana selalu dilekatkan orang kepadanya.²⁰

Bagaimanapun era kebangkitan NU tahun 1950 hingga 1960-an Kiai Idham Chalid bersama Kiai Wahab Chasbullah punya andil penting dalam proses ini. Duet antara Rais Am dengan Ketua Tanfidziyah itu berhasil menggerakkan mesin organisasi mulai dari Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, hingga Ranting. Sesuai dengan zaman perjuangan saat itu semua kegiatan ke Wilayah dan Cabang didanai sendiri. Maka tidak mengherankan ketika NU baru menjadi partai politik pada tahun 1952, ketika mengikuti pemilu 1955 NU berhasil menduduki peringkat ketiga, sehingga sejak saat itu NU menjadi salah satu penentu arah republik ini.²¹

¹⁹ Hasyim Muzadi, *Idham Chalid: Memimpin NU di Masa Penuh Gejolak. Dalam Arief Mudatsir Mandan (ed), Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), cet.I, h. xiii.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, h. xiv.

Duet antara Rais Am Kiai Wahab Chasbullah yang gigih dan pendobrak dengan Kiai Idham Chalid yang lemah lembut merupakan duet yang ideal. Karena Kiai Wahab selalu bergerak sebagai perintis, pendobrak ibarat pasukan tempur. Sementara Kiai Idham Chalid sebagai penerus ibarat seorang diplomat yang menyelesaikan perjuangan di meja perundingan. Di satu sisi NU bersikap tegas, di lain sisi memang harus melakukan kompromi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, sehingga sikap politik NU menjadi sangat lentur. Inilah yang kemudian oleh para lawan politiknya dituduh sebagai oportunis.²²

Masa krisis yang sangat menentukan adalah saat Dekrit Presiden 1959 dengan kembali ke UUD 1945 yang berimplikasi penggantian sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Proses itu diikuti NU secara kritis, presiden harus tetap bias dikontrol, harus tetap ada mekanisme *check and balances*. Kalaupun akhirnya NU menerima, memang gelombang itu tidak lagi bisa ditolak, lagi pula memang situasi liberal yang anarkis itu telah merusak tidak hanya sendi-sendi politik negeri ini, tetapi juga telah melumpuhkan sendi-sendi sosial, sehingga kemerdekaan yang diproklamkan tidak segera diisi dengan pembangunan.²³

Berbeda dengan kelompok Kiai Bisri Sansuri yang melihat persoalan ini semata dari hukum fiqih sehingga menghukuminya sebagai *bughat*, yang harus ditindak. Sementara Kiai Wahab dan Idham Chalid melihatnya sebagai persoalan perjuangan politik, maka harus pasang strategi agar bisa mengendalikannya. Sebagai kelanjutannya NU harus terlibat sebagai salah satu elemen penting dalam Front

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Nasional bersama elemen politik penting lainnya yaitu PNI dan PKI, yang terdiri dari unsur nasionalis (PNI) agama (NU) dan komunis (PKI). Front itu digunakan sebagai ujung tombak pembangunan nasional semesta untuk mensejahterakan rakyat. Dan dijadikan front untuk membentengi bangsa ini dari serangan imperialisme dari luar.²⁴

Dalam kekuasaan itu tidak dengan sendirinya NU hanya bertopang dagu menikmati kekuasaan, sebab niat masuknya saja adalah untuk membendung pengaruh PKI baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Maka dalam Nasakom NU berusaha keras mengganjal berbagai kebijakan PKI, walaupun harus bersitegang dengan Presiden Soekarno. NU tetap konsisten sejak tahun 1950-an telah menolak berdirinya kabinet empat kaki bersama komunis. Maka ketika Masyumi dibubarkan, NU di bawah berjuang sendirian membendung arus PKI. Kalaupun ada kekuatan lain hanya kecil saja, kecuali tentara yang memiliki kekuatan memadai.²⁵

Para lawan politik NU menilai bahwa NU oportunistis hanya mengikuti Bung Karno untuk mengejar kedudukan politik. Padahal tanpa harus mengemis ke Bung Karno NU pasti akan memperoleh kursi di kabinet sebagai partai pemenang ketiga. Apalagi sebagai representasi politik umat Islam saat itu tidak mungkin membentuk kabinet dengan melupakan NU. Karena itu sedekat apapun NU dengan Soekarno NU tetap bersikap kritis, terutama yang ditunjukkan oleh tokoh seperti Kiai Bisri, Imron Rosyadi dan Ahmad Syaikh. Ini karena NU tetap menjalankan peran sebagai penjaga keseimbangan. Dalam mengambil sikap itu NU tidak perlu mempertaruhkan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, h. xv.

posisinya. NU sebagai partai besar tentu tidak khawatir akan kehilangan posisi politiknya sebab rakyat dan umat Islam mendukungnya.²⁶

Ada satu hal yang dilupakan orang tentang kedekatan NU dengan negara khususnya pemerintahan Bung Karno, yang bukan semata persoalan teknis, melainkan karena adanya persamaan ideologis, yang bersifat nasionalis. Karena itu NU menolak petualangan kelompok Islam dengan membentuk DI-TII karena dianggap mengkhianati republik yang selama ini NU turut memperjuangkan. Demikian NU menolak PRRI bukan karena khawatir aliansinya dengan Soekarno retak. Karena memang melihat gerakan itu sebagai *bughat* (pemeberontak) terhadap negara sah yang harus dilawan.²⁷

Semuanya itu menambah kuatnya orang menuduh NU sebagai oportunis. Padahal semua itu dijalankan karena memang prinsip dasar NU adalah kebangsaan, karena itu NU menolak semua sikap dan tindakan yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Memang jarak antara oportunisme dengan keluwesan dan kecerdikan itu sangat tipis, karena itu ukurannya harus jelas. Kalau suatu sikap diambil atas dorongan kepentingan pribadi atau kelompok semata itu oportunis, tetapi kalau suatu sikap kompromis yang diambil demi kepentingan dan kemaslahatan negara dan bangsa maka itu suatu sikap idealis bahkan ideologis. Terbukti dengan cara itu NU secara organisasi bisa tetap eksis, dan eksistensi NU

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

yang tetap kuat terbukti bisa menjaga keseimbangan kehidupan sosial politik di negeri ini.²⁸

Kiai Idham Chalid bukan pemimpin karbitan, tetapi pemimpin yang teruji, yang berproses dari bawah betul dari daerah asalnya di Amuntai. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang beberapa kali masuk penjara dengan berbagai macam siksaan. Ketika masuk ke kancah nasional justru masa penuh gejolak yakni masa perjuangan kemerdekaan. Demikian juga ketika masuk di NU justru pada masa-masa konsolidasi yang harus memeras tenaga dan pikiran untuk membenahi organisasi ini, sebagai upaya menjadikannya sebagai kekuatan politik nasional yang disegani. Semuanya dijalani dengan penuh kesabaran karena dianggap sebagai amanah Tuhan.²⁹

Dengan adanya dasar kepemimpinan semacam itu maka berbagai gejolak sosial dan politik selama masa kepemimpinannya bisa dilalui dengan selamat, seperti pada masa Dekrit Presiden, masa Demokrasi Terpimpin, masa Nasakom, dan masa kudeta 1967. Karena itu ketika memasuki tahun 1970-an kondisi NU masih tetap solid. Ketika PNI dan PKI serta Masyumi telah berantakan, NU di bawah kepemimpinan Kiai Idham Chalid dan Kiai Wahab masih menunjukkan keutuhannya dan kekuatannya yang besar sehingga pada pemilu 1971 partai NU tampil sebagai pemenang kedua setelah Golkar. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ormas dan partai politik manapun, yang bisa mengarungi

²⁸ *Ibid.*, h. xvi.

²⁹ *Ibid.*,

masa demi masa yang penuh gejolak itu dengan selamat. Tidak ada pengamat yang mampu melihat kenyataan itu dengan jernih.³⁰

Sebuah organisasi sosial tidaklah selalu harus serba rasional, serba forma seperti sebuah birokrasi. Nampaknya itu sikap yang ditunjukkan Kiai Idham dan Kiai Wahab yang selalu tampil informal dalam mengurus organisasi. Sementara itu kita selalu membayangkan organisasi itu seperti birokrasi, dan melihat gaya NU itu tradisional. Kenyataannya banyak organisasi besar yang lahir sebelum dan bersamaan dengan NU yang dipimpin oleh lulusan sekolah Belanda tak mampu bertahan, sementara NU yang sejak dulu dituduh sebagai tradisional, tidak kompak, tidak disiplin malah semakin berkembang, bahkan pengaruhnya secara nasional maupun internasional semakin kuat. Rahasia ini yang perlu dicari dijadikan sarana pengembangan NU ke depan.

Melihat kenyataan itu, banyak organisasi di dunia Barat yang semula melihat NU tidak relevan, tidak sesuai dengan dunia modern, saat ini berbalik lebih mengapreseasi NU sebagai organisasi masa depan. Demikian juga kalangan Islam Timur Tengah khususnya di Saudi Arabia dan para ulama Wahabi dan kaum modernis pada umumnya yang melihat NU bukan Islam, penuh *bid'ah* dan *khurafat*. Melihat perkembangan NU yang semakin positif dan relevan dengan kehidupan dunia yang plural dewasa ini, mereka akhirnya mengakui NU sebagai ormas Islam.

Peran Kiai Idham Chalid dalam mencitrakan NU sebagai organisasi yang dinamis dan sangat besar, ditunjang oleh kepribadiannya yang memang luwes dan lemah lembut, sehingga dia disegani baik kawan maupun lawan. Karena itu

³⁰ *Ibid.*, h. xvii.

walaupun bukan dari etnis Jawa, dia bisa memimpin NU lebih lama. Ini juga menunjukkan bahwa NU itu bukan hanya milik orang Jawa, tetapi milik bangsa Indonesia secara keseluruhan, bahkan nanti akan menjadi milik dunia. Ini bisa dimengerti bahwa sejak awal berdirinya NU tidak hanya memikirkan bangsa, tetapi juga memikirkan bangsa-bangsa lain di dunia sampai sekarang sesuai dengan symbol NU, jagad, yang menunjukkan misi NU itu mendunia.

Setiap pemimpin memiliki kelemahan, tidak terlepas pula Pak Idham. Tetapi bila ditimbang maka sumbangan dan perjuangannya masih jauh lebih unggul, dibanding kelemahannya. Bagaimanapun kebesaran NU juga berkat perjuangannya. Bagaimanapun dinamika politik bangsa tahun 1950-1970-an yang meneguhkan landasan bangunan rumah Indonesia tidak lepas dari perannya. Itulah sebab perjuangannya perlu ditulis, ditafsirkan kembali agar langkah penting yang telah dirintis bisa dilanjutkan oleh generasi saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul “**Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.H. Dr. Idham Chalid)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apa saja pemikiran politik K.H. Dr. Idham Chalid tentang Relasi Islam dan Negara dalam Konteks Ke-Indonesiaan?

2. Bagaimana K.H. Dr. Idham Chalid memposisikan NU dalam formasi relasi Islam dan negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran politik K.H. Dr. Idham Chalid tentang relasi Islam dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan.
2. Untuk mengetahui posisi NU dalam formasi relasi Islam dan negara di Indonesia menurut pandangan Idham Chalid.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan, khususnya tentang politik Islam.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang politik Islam.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir politik Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan multi interpretasi, sebelum memasuki penelitian ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Peran diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.³¹

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat

³¹ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-5, h. 735.

memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.³²

Politik dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tatacara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya. Politik adalah segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.³³

Dalam Kamus Hukum, politik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan; dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.³⁴ Sedangkan Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan Hukum Islam.³⁵ Politik Islam bisa juga berarti pengurusan atas urusan seluruh umat Islam.³⁶

Politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya.³⁷

³² Marilyn Friedman, *Family Nursing: Theory & Practice* <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-Para-Ahli.html> (17 April 2013).

³³ W.J.S., Poerwadaminta, *Kamus Besar ...*, h. 763.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h. 367.

³⁵ <http://permatahatiku2020.wordpress.com/2012/04/25/apa-itu-politik-Islam.html> (17 April 2013).

³⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam.html (17 April 2013).

³⁷ Ini adalah pendapat Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip dalam <http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/siyasah-politik-islam.html> (17 April 2013). h. 1.

Ada juga yang mengartikan Politik Islam dengan memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan mereka kepada jalan yang dapat menyelamatkan mereka di waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³⁸ Politik Islam berasal dari Nabi SAW. baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, berasal dari para Pemerintah, bukan lainnya, secara batin berasal dari Ulama sebagai pewaris para Nabi.³⁹

KH Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, adalah anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya H. Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin.⁴⁰

Saat usianya baru enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya. Kiprah dan peran Idham Chalid tergolong istimewa. Ia bukanlah sosok yang berasal dari warga kota besar.⁴¹

K.H. Idham Chalid merintis karier dari tingkat yang paling bawah, sebagai guru agama di kampungnya. Tapi kegigihannya dalam berjuang, dan kesungguhannya untuk belajar dan menempa pribadi, telah mengantarkan dirinya ke puncak kepemimpinan nasional yang disegani.⁴²

³⁸ Pengertian ini adalah menurut Wuzarat al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Ibid.*, h. 2.

³⁹ Pengertian ini menurut Imam Ibn Abidin, *Ibid.*

⁴⁰ <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/135.html>. (13 April 2013), dan dalam <http://www.islambalikpapan.com/2013/03/kh-idham-chalid-ulama-kalimantan.html> (13 April 2013)

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Idham Chalid adalah salah satu tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis. Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasah Pondok Modern Gontor, ini tidak kuatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian, bunglon bahkan avonturir.⁴³

Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodir itu kadang kala membuat banyak orang salah memahami dan mendepksripsi diri, pemikiran serta sikap-sikap sosio-politikny.⁴⁴ Namun jika disimak dengan seksama, sesungguhnya KH Idham Chalid yang berlatarbelakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa.⁴⁵

Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955-1984), itu berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi situasi politik di masa demokrasi

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan Ormas radikal.⁴⁶

Dalam pandangan K.H. Idham Chalid bahwa seorang politisi yang baik mestilah memahami filosofi air.

“Apabila air dimasukkan pada gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember ia akan berbentuk ember, apabila ia dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk aslinya. Dan, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal ia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia.”⁴⁷

Sebagai ulama dan politisi pelaku filosofi air, Idham Chalid dapat berperan sebagai tokoh yang santun dan pembawa kesejukan. Ia pernah menjadi Ketua Partai Masyumi Amuntai, Kalimantan Selatan, dan dalam Pemilu 1955 berkampanye untuk Partai NU. Ia pernah pula menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, dalam usia yang masih sangat belia, 34 tahun. Sejak itu Idham Chalid terus menerus berada dalam lingkaran kekuasaan.⁴⁸

Di organisasinya, ia dipercaya warga nahdliyyin untuk memimpin NU di tengah cuaca politik yang sulit, dengan memberinya kepercayaan menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU selama 28 tahun (1956 – 1984).⁴⁹

Di samping berada di puncak kekuasaan pimpinan NU, ia juga dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI), 1956 –

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

1957. Saat kekuasaan Bung Karno jatuh pada 1966, Idham Chalid yang dinilai dekat dengan Bung Karno ini tetap mampu bertahan.⁵⁰ Bahkan, Presiden Soeharto memberinya kepercayaan selaku Menteri Kesejahteraan Rakyat (1967 – 1970), Menteri Sosial Ad Interim (1970 – 1971) dan setelah itu Ketua MPR/DPR RI (1971 – 1977) dan Ketua DPA (1977 -1983).⁵¹ Ketika partai-partai Islam berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan, pada tanggal 5 Januari 1973, mantan guru agama Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo ini menjadi ketua, sekaligus Presiden PPP.⁵²

Dari sisi wawasan keilmuan dan kemahiran, sosok Idham Chalid dikenal sebagai ulama yang mahir berbahasa Arab, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ia juga menyanggah gelar doctor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo.⁵³

Kerendahan hati merupakan sifat Kiai Idham Chalid, tidak hanya pada para kiai, pada orang biasapun bisa bergaul dengan supel. Ia selalu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan dan akrab dengan siapa saja. Sikap ramah dan simpatik itulah salah satu modal kesuksesannya sehingga bertahan dalam waktu yang cukup lama.⁵⁴

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

KH.Dr.Idham Chalid (88) meninggal dunia di kediamannya di kawasan pendidikan Darul Ma'arif, Cipete, Jakarta Selatan, Ahad (11/7) pagi, pukul 08.00 WIB, karena sakit yang diderita selama 10 tahun terakhir.⁵⁵

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan Penulis, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan NU dan Politik, di antaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir dalam karyanya yang berjudul: "Idham Chalid: Guru Politik Orang NU". Dalam penelitian ini Ahmad Muhajir lebih menfokuskan penelitiannya pada pandangan-pandangan K.H. Dr. Idham Chalid mengenai demokrasi terpimpin dan ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong pandangan tersebut muncul. Muhajir juga melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur ilmiah tentang Idham Chalid, akan tetapi bagian utama dari buku ini dikhususkan untuk menjelaskan dan menganalisis pemikiran politik keagamaan Idham Chalid, terutama yang berhubungan dengan sikap-sikap NU merespons Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Muhajir juga memusatkan diri pada penafsiran Idham Chalid mengenai konsep *Syura* dan bagaimana tafsiran itu digunakan untuk menjustifikasi penerimaan ideologi semi-otoriter Demokrasi Terpimpin.

⁵⁵*Ibid.*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suaidi Asyari dalam bukunya yang berjudul: “Nalar Politik NU dan Muhammadiyah”, yang diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta, tahun 2009. Sifat penelitiannya adalah komparatif. Data-data mengenai studi ini dikoleksi dari sumber-sumber elektronik maupun cetak dan melalui wawancara di lapangan. Dalam Penelitian ini Suaidi Asyari meneliti tentang peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam proses demokratisasi di Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Penelitian ini berbeda baik secara fokus maupun tujuan dengan penelitian Penulis. Penulis dalam penelitian ingin melihat peran Nahdlatul Ulama dalam politik Islam lewat pemikiran tokohnya.
3. Asep Saeful Muhtadi dalam penelitiannya yang berjudul: “Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif “. Dalam penelitian ini Asep Saeful Muhtadi mengadakan kajian tentang NU dilihat dari aspek kegiatan komunikasi politik yang diperankannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asep Saeful Muhtadi baik dari segi ide maupun fokus penelitian yang dilakukan.
4. “NU dan Politik Kebangsaan di Indonesia, Revitalisasi Gerakan Politik Kebangsaan NU Untuk Pemberdayaan Bangsa". Yang ditulis oleh Fathor Rahman. Tulisan ini membahas fenomena pola gerakan politik kebangsaan NU dalam keterkaitannya dengan kehidupan basis komunitas NU tetap terpuruk hingga saat ini. Secara teoritis tulisan ini memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran dalam membebaskan

ketertindasan masyarakat Indonesia umumnya, dan basis komunitas NU khususnya. Secara praktis, tulisan ini memberikan gambaran alternatif pemikiran untuk menyelesaikan kompleksitas masalah bangsa Indonesia, khususnya masyarakat NU saat ini. Karakter tulisan ini adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada kajian teks dan pengamatan kehidupan orang-orang NU. Metode pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode sejarah. Analisa datanya memakai analisa kualitatif.

5. “Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama: Antara Keteguhan Khittah dan Syahwat Politik”, yang ditulis oleh Trianto. Tulisan ini membahas tentang paradigma politik kiai Nahdlatul Ulama, karakteristik politik kiai, dan peta perubahan politik kiai.
6. Muhammad Tholhah Hasan, dengan tulisan yang berjudul: “Ahlussunnah waljamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU”. Dalam tulisan ini membahas tentang wawasan kebangsaan dan kenegaraan Nahdlatul Ulama, dan NU dalam koridor politik.
7. Imam Suprayogo, dengan penelitiannya yang berjudul: “Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai”, (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995). Penelitian ini memusatkan kajiannya pada perilaku politik kyai, tipologi kyai, rasionalitas kyai berpolitik dan diakhiri dengan implikasi perpolitikan kyai. Dalam penelitian ini Imam Suprayogo mengadakan kajian tentang NU yang diwakili kyai dilihat dari aspek kegiatan politik yang diperankannya.

Dari beberapa penelitian yang telah diutarakan di atas, terlihat bahwa tidak ada kesamaan ide dari penelitian yang telah dilakukan sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisa terhadap sumber rujukan tidak keluar dari bahan yang diteliti, yaitu bahan-bahan kepustakaan. Analisa juga berpusat pada bahan kepustakaan yang terkait dengan peran Nahdlatul Ulama dalam politik Islam lewat pemikiran tokohnya beserta segala permasalahannya. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan pendekatan studi tokoh, di mana peneliti mengkaji pemikiran KH. Dr. Idham Chalid baik itu persoalan-persoalan, situasi atau kondisi yang mempengaruhi terhadap pemikiran beliau. Selanjutnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, buku-buku yang dapat dijadikan sebagai informasi atau melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun sekunder sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. Setelah itu dianalisis dengan metode analisis interpretasi, metode ini digunakan untuk menyelami isi buku, untuk setepat mungkin mampu mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan.

Sumber atau rujukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer adalah bahan referensi pustaka utama dan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1. Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah karya Arief Mudatsir Mandan

Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak berhubungan langsung dengan pokok bahasan, tetapi hanya sebagai pendukung. Sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw dari berbagai sumber.
2. Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004).
3. Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah, karya H. Soeleiman Fadeli dan M. Subhan.
4. NU Dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran karya KH. Abdul Muchith Muzadi.
5. Mengenal Nahdlatul Ulama karya KH. Abdul Muchith Muzadi.
6. Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan, Editor: Tim PW. LTN-NU Jatim.
7. Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif karya Asep Saeful Muhtadi.
8. Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris karya Suaidi Asyari.
9. Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai karya Imam Suprayogo.
10. kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis, kitab-kitab fiqh secara umum, serta buku-buku yang membantu menerangkan isi dari sumber primer.

Sedangkan sumber-sumber tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan akan substansi yang ada dalam sumber-sumber primer dan sekunder.

Sumber tersier antara lain: kamus-kamus, beberapa ensiklopedi, jurnal-jurnal serta makalah-makalah yang ada di internet.

H. Sistematika Pembahasan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari tesis ini melalui sistematika pembahasan. Tesis ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Deskripsi Umum tentang Idham Chalid: Riwayat Hidup dan Gaya Kepemimpinannya, yang meliputi, Kelahiran Idham Chalid, Pendidikan dan Kontribusi Idham Chalid dalam Dunia Pendidikan, Karir Politik Idham Chalid, Gaya Kepemimpinan: Kesamaan, Pengaruh, dan Keyakinan Idham Chalid.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan tentang negara dalam perspektif Islam dan peran Nahdatul Ulama dalam percaturan politik pemerintahan di Indonesia, yang meliputi Teori Hubungan Islam dan Negara, Pemikiran Islam tentang Negara, Pemikiran Islam tentang Negara di Indonesia, Nahdlatul Ulama dari Masa ke Masa, yang meliputi Nahdlatul Ulama pada masa kolonial dan kemerdekaan, Nahdlatul Ulama pada masa Orde lama, Nahdlatul Ulama pada masa Orde Baru, Nahdlatul Ulama pada masa Reformasi.

Bab IV Analisis Pembahasan pemikiran politik K.H. Idham Chalid tentang Relasi Islam dan Negara dalam Konteks Ke Indonesiaan dan posisi NU dalam

Formasi Relasi Islam dan Negara di Indonesia, yaitu Relasi Agama dan Negara, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Demokrasi, Presiden Indonesia, yang diambil dari penjelasan-penjelasan beliau baik secara langsung beliau nyatakan maupun secara tidak langsung dalam sumber primer, juga dalam pembahasan ini berisi analisis Penulis mengenai pemikiran beliau.

Bab V Penutup akhir dari penelitian yang telah dilakukan, ditulis dalam bentuk kesimpulan berikut saran-saran dari peneliti mengenai tesis ini.